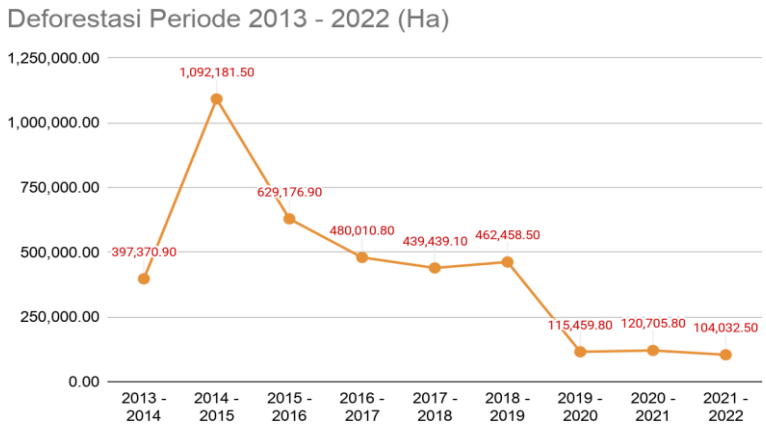
# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor kehutanan menjadi salah satu sumber daya alam yang memberikan nilai ekonomis terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, pengelolaan masa lalu yang cenderung eksploitatif dari pemegang izin usaha konsesi hutan kepada pengusaha menyebabkan kerusakan lingkungan yang tinggi melalui deforestasi (Rustiadi dan Veriasa, 2022). Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa luas deforestasi di Indonesia pada periode 2013-2022 telah mencapai 3,84 juta hektar. Hal ini terjadi karena adanya perubahan fungsi hutan menjadi penggunaan lahan lain, seperti pertanian komersial dan subsisten, penebangan kayu, infrastruktur, serta pertambangan (Feurer *et al.*, 2025). Data pada gambar 1.1 menunjukkan tren deforestasi yang terjadi di Indonesia.




**Gambar 1.1 Tingkat Deforestasi di Indonesia**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)*

Berdasarkan gambar tersebut, deforestasi tertinggi terjadi pada rentang tahun 2014-2015 yang mencapai 1,09 juta hektar. Lambin (dalam Juniyati dan

Situmorang, 2023) menyebut bahwa kondisi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap produksi sumber daya dan ketahanan pangan. Namun, penurunan angka deforestasi terjadi pada rentang tahun 2021-2022 yang hanya sekitar 104 ribu hektar. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Wiratno (dalam Faadhilah, 2024) melihat telah terjadi pergeseran paradigma pengelolaan hutan yang semula berbasis hasil hutan kayu menjadi sumber daya non kayu yang memiliki sifat multifungsi.

Realitanya, mayoritas masyarakat Indonesia masih mengandalkan alam sebagai sumber mata pencaharian, khususnya sektor pertanian. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan dengan persentase sebesar 62,39% dan menyerap tenaga kerja hingga 40,6 juta jiwa lapangan pekerjaan (Aidah *et al.*, 2023). Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan juga cenderung mengakses lahan hutan untuk menanam padi (Rustiadi dan Veriasa, 2022). Data BRIN (2022) menunjukkan bahwa terdapat 48,8 juta masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan 9,8 juta jiwa digolongkan sebagai masyarakat miskin. Padahal, mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi (Mahdavi, Hashemi dan Yazdani, 2024). Hal ini dikonfirmasi Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022 yang menemukan bahwa rumah tangga miskin paling banyak justru bekerja pada sektor pertanian yang mencapai 49,89%, lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya yang tercantum dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Sumber Penghasilan Utama Tahun 2022**

| No. | Sektor Pekerjaan | Rumah Tangga (%) | |
|---|---|---|---|
| | | Miskin | Tidak Miskin |
| 1. | Pertanian | 49,89 | 31,48 |
| 2. | Lainnya | 22,42 | 38,11 |
| 3. | Industri | 16,66 | 19,09 |
| 4. | Tidak Bekerja | 11,03 | 11,32 |

*Sumber: Databoks (2024)*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan sumber daya alam tidak selalu diiringi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Itang (dalam Arliansyah *et al.*, 2024) menilai terdapat faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Melihat salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah sumber daya manusia, pengelolaan hutan yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kemampuan guna mengelola kawasan izin yang diberikan secara produktif (Budi *et al.*, 2021). Sumber daya manusia memegang peranan penting dan dapat memengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sebuah tujuan (Gunade dan Sagita, 2024).

Pemerintah sebagai aktor sentral dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pembangunan sektor kehutanan perlu untuk melakukan intervensi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang menjelaskan bahwa sistem penyuluhan memiliki tujuan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial. Kegiatan penyuluhan menjadi bentuk usaha pendidikan non formal

kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah untuk mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan agar mampu meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan (Gunade dan Sagita, 2024). Aktor pemerintah yang melaksanakan kegiatan ini adalah penyuluh kehutanan dalam implementasi kebijakan pembangunan kehutanan.

Salah satu wilayah kerja strategis penyuluh kehutanan berada di Pulau Jawa dengan jumlah kawasan hutan seluas 3,04 juta hektar tahun 2016 menurut catatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura yang terbagi atas hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi (Mugiono, 2021). Tutupan hutan aktual yang ada di Pulau Jawa hanya 19% dari luas daratan sehingga masih berada di bawah rasio ideal sebesar 30% (Forestdigest, 2021). Sementara itu, sebesar 85,37% kawasan hutan lindung dan produksi di Pulau Jawa dikelola oleh Perum Perhutani sejak tahun 1972 (Hardiyanti, 2019) dengan pengelolaan yang belum sepenuhnya lestari sehingga berdampak pada rendahnya tanaman tegakan dan tutupan lahan (Ramadhan dan Amalia, 2021). Kondisi ini berkontribusi terhadap jumlah luas lahan kritis pada tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2 Data Luas Lahan Kritis Tahun 2018 (ribu/ha)**

| No. | Provinsi | Lahan Kritis |
|---|---|---|
| 1. | Jawa Barat | 911,2 |
| 2. | Jawa Tengah | 375,7 |
| 3. | Jawa Timur | 432,2 |
| 4. | Banten | 330,4 |
| **Jumlah** | | 2.049,5 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)*

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa luas lahan kritis yang terjadi di Pulau Jawa termasuk dalam kategori tinggi, yaitu 2,04 juta hektar. Lahan kritis ditetapkan pada lahan yang rusak karena kehilangan penutupan vegetasi akibat alih fungsi lahan (Harniawati, Kismartini dan Purnaweni, 2021). Sebaran lahan kritis di Pulau Jawa didominasi di wilayah luar kawasan hutan sebesar 65,21% dan sisanya sebesar 34,79% berada di dalam kawasan hutan negara. Di tingkat regional, urgensi penanganan lahan kritis menjadi hal yang mendesak bagi Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2022 menjadi 458,4 ribu hektar dibandingkan provinsi lainnya yang cenderung mengalami penurunan lahan kritis (Kementerian Kehutanan, 2025). Guna menekan peningkatan angka lahan kritis, Pemerintah menerapkan kebijakan perhutanan sosial dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan berkelanjutan di kawasan hutan negara atau non negara yang melibatkan masyarakat lokal atau adat dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Rakatama dan Pandit, 2020). Di tahun 2023, capaian terhadap program inovatif pemerintah di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 92,3 ribu hektar lahan dari target 79,4 ribu hektar dengan 114 jumlah SK yang telah terbit di berbagai kota dan kabupaten (Pambudi, 2023). Program ini membantu 21.736 kepala keluarga yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kehutanan telah sepenuhnya mendukung program ini untuk mendukung percepatan akses. Namun, implementasi kebijakan ini pasca pemberian izin belum berjalan

dengan maksimal. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok (Veriasa *et al.*, 2023).

Fauzi (dalam Lawasi, 2022) melihat pendampingan kelembagaan diperlukan sebagai proses edukasi melalui penguatan modal dasar organisasi agar mampu menyelenggarakan kegiatan perhutanan sosial dan sarana pembinaan kelompok secara intensif. Pembentukan kelompok diharapkan dapat menjadi forum untuk mengembangkan sumber daya manusia dan memberdayakan individu dalam memenuhi kebutuhan dan masalah sosial (Rahayu et al., 2024). Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas kelompok tani belum dapat berdaya. Berdasarkan data pada Simluh (Januari, 2026) ditemukan bahwa bahwa terdapat 4.896 KTH yang telah terbentuk di Provinsi Jawa Tengah. Kelembagaan KTH tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelas, yaitu Pemula, Madya, dan Utama untuk menilai kemampuan kelompok mengelola kawasan hutan secara mandiri dengan rincian dalam tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3 Jumlah KTH di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kelas**

| No. | Kelas KTH | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Pemula | 4.494 |
| 2. | Madya | 353 |
| 3. | Utama | 49 |
| **Jumlah** | | **4.896** |

*Sumber: Sistem Penyuluhan Kehutanan (Januari, 2026)*

Berdasarkan data tersebut, nampak bahwa terdapat 4.494 KTH berada di kelas Pemula dengan kinerja KTH berada pada angka <350 sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Hal ini tertera dalam pasal 19 dan 20 Peraturan Menteri LHK Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan bahwa

pembinaan KTH dilakukan untuk mewujudkan kelompok yang produktif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan dalam aspek kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. Penilaian kelas kelompok tani membantu melaksanakan identifikasi terhadap tingkat keberdayaan petani dalam mengembangkan usaha taninya (Dewi *et al.*, 2023). Petani menjadi pelaku utama yang menentukan keberhasilan pembangunan pertanian melalui partisipasi yang dilakukan (Irdiana *et al.*, 2023) sehingga tingginya jumlah kelompok dengan kelembagaan kelas Pemula menyebabkan adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Kondisi kelembagaan KTH di Provinsi Jawa Tengah mencerminkan bahwa kebijakan perhutanan sosial yang dilakukan belum sepenuhnya memberdayakan KTH untuk mencapai kemandirian sebagai akibat dari pendampingan yang tidak optimal dari penyuluh kehutanan. Merujuk pada perspektif administrasi publik, penyuluh kehutanan menempati posisi sebagai *street-level bureaucrat* atau birokrat pemerintah yang tidak hanya memberikan pelayanan publik melalui penyuluhan tetapi mengoptimalkan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia (Lipsky dalam Devi dan Ismail, 2024). Menurut data Simluh (Januari, 2026), penyuluh kehutanan PNS yang aktif bertugas berjumlah 321 orang. Fenomena ini menyebabkan beban birokrasi yang berlebihan sehingga pelaksanaan tugas tidak berjalan optimal (Siwi *et al.*, 2025).

Salah satu kelompok tani yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan kategori kelas Pemula adalah KTH Mandiri Jaya. Kelompok ini berada di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang di bawah wilayah kerja

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. KTH Mandiri Jaya mendapat SK Perhutanan Sosial melalui skema IPHPS atau Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial dengan pertimbangan adanya jumlah lahan terbuka seluas 111 hektar di kawasan hutan negara KPH Semarang, Perum Perhutani. Oleh karena itu, kelompok ini diberikan kewenangan untuk mengelola seluas 118 hektar lahan hutan sebagai akses legal petani untuk memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharian mereka melalui SK.2663/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2021.

Berdasarkan rencana kerja tahunan KTH Mandiri Jaya, kelompok ini memiliki rencana pengembangan usaha di tahun 2022 untuk budidaya tanaman obat, jamur, lebah, dan ikan lele, pengolahan pupuk organik, serta produksi jagung pipilan dan pakan ternak. Menurut data GoKUPS (Desember, 2025), nilai transaksi ekonomi yang berhasil dicapai oleh KTH Mandiri Jaya mencapai Rp578 juta rupiah pada usaha pipil jagung dan penjualan terhadap buah pisang sebesar Rp7,6 juta rupiah. Namun, kinerja kelompok yang baru mengandalkan jagung sebagai pendapatan utama menyebabkan pengelolaan lahan belum tepat secara kawasan yang diperuntukkan pada lahan IPHPS. Hal ini relevan dengan penelitian oleh Dewi *et al.* (2023) dan Pri *et al.* (2025) bahwa kegiatan pemberdayaan terhambat pada kesiapan administratif kelompok. Data dalam tabel 1.4 merinci potensi tersebut.

**Tabel 1.4 Data Usaha KTH Mandiri Jaya**

| No. | Nama KUPS | Potensi | Hasil Usaha | Nilai Ekonomi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mandiri Jaya II | Pembibitan | Bibit | - |
| 2. | Mandiri Jaya I | Palawija | Jagung | 578.250.000 |
| | | Buah-Buahan | Pisang | 7.650.000 |
| 3. | Mandiri Jaya III | Buah-Buahan | - | - |

*Sumber: GoKUPS (Desember, 2025)*

Tabel diatas menunjukkan bahwa KTH Mandiri Jaya memiliki tiga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yaitu KUPS Mandiri Jaya I, KUPS Mandiri Jaya II, dan KUPS Mandiri Jaya III dengan adanya diversifikasi potensi usaha yang diusahakan oleh masing-masing kelompok. Menurut Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, pembentukan KUPS dilakukan untuk pengembangan usaha perhutanan sosial berbasis komoditas. Data dalam tabel tersebut menilai bahwa potensi usaha yang berkembang secara produktif baru dilakukan oleh KUPS Mandiri Jaya I dengan potensi tanaman palawija sedangkan KUPS Mandiri Jaya II dan KUPS Mandiri Jaya III belum memiliki nilai ekonomi terhadap potensi yang direncanakan. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa pendamping belum memberikan dukungan terhadap kontinuitas kelompok usaha melalui strategi pengembangan jenis usaha (Munthe *et al.*, 2024).

Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) dalam teorinya tentang peran pendamping pembangunan masyarakat menilai bahwa melaksanakan pemantauan terhadap kinerja kelompok menjadi fungsi teknis dalam manajemen organisasi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini membantu kelompok menetapkan prioritas dalam rencana kerja sehingga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Pengelolaan IPHPS mewajibkan penerima izin untuk mempertahankan fungsi hutan melalui diversifikasi usaha melalui produk hutan non kayu yang dapat menjadi sumber pendapatan baru (Musa *et al.*, 2023). Kondisi yang terjadi di KTH Mandiri Jaya saat ini terjadi inkonsistensi antara rencana strategis dan realita perkembangan usaha yang diduga karena pemantauan yang tidak optimal sehingga kontinuitas usaha untuk KUPS belum merata.

Selain aspek kelembagaan, kegiatan rehabilitasi kawasan juga belum berjalan secara optimal. Kelompok ini telah berdiri sejak tahun 2021 dan mendapat bantuan bibit tanaman kehutanan serta produktif untuk mendukung kemandirian usaha KTH Mandiri Jaya hingga 43.000 bibit di tahun 2022. Namun, data Buku Saku IPHPS CDK III tahun 2024 mencatat bahwa terdapat beberapa persoalan teknis yang dihadapi kelompok, seperti pengolahan lahan yang tidak sesuai kaidah konservasi serta penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan produktivitas bibit tanaman yang diterima belum optimal. Hal ini membatasi kapasitas petani untuk memiliki usaha yang lebih variatif (Lawasi, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran edukasional penyuluh kehutanan dalam meningkatkan pengetahuan petani melalui budidaya tanaman (Mkuki dan Msuya, 2020) belum dijalankan optimal sehingga bantuan bibit tidak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Terakhir, kerangka peran krusial yang berhasil diidentifikasi oleh Ife adalah peran representatif. Menurut Hidayat *et al.* (2024) mengidentifikasi peran dinamisator salah satunya adalah menginisiasi jaringan dan kolaborasi. Peran ini memungkinkan penyuluh untuk menjalin kerja sama usahatani agar kelompok dapat berkembang (Latuan *et al.*, 2023). Berdasarkan penelitian Hilalia *et al.* (2024) menemukan hasil bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di KTH Mandiri Jaya belum berjalan secara optimal karena ketiadaan akses kepada pasar untuk pemasaran produk. Kondisi ini memiliki indikasi bahwa jejaring kerja sama belum terbentuk dan berdampak pada lemahnya daya saing kelompok untuk memasarkan usahanya secara kompetitif. Hal ini menguatkan urgensi untuk melakukan

penelitian peran penyuluh kehutanan dalam memberdayakan KTH Mandiri Jaya sejak kelompok terbentuk di tahun 2021.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat lokal (Firmanto *et al.*, 2023). Penyuluh kehutanan memiliki peran krusial dalam melakukan pemeliharaan dan pelestarian sumber daya hutan di Indonesia (Imran *et al.*, 2024) sehingga menjadi agen perubahan yang menjalankan pemberdayaan yang merata melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat (Ayyub *et al.*, 2025). Kolaborasi yang harmonis antara penyuluh dan petani dapat menghasilkan petani yang profesional (Latuan *et al*., 2023) untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi lahan (Ridwan *et al.*, 2025). Hal ini diwujudkan dalam pelaksanaan fungsinya untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada kelompok tani (Gitosaputro *et al.*, 2025).

Namun, keberhasilan penyuluh kehutanan dalam memberdayakan KTH tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis yang dimiliki melainkan kemampuan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan. Identifikasi masalah menemukan bahwa KTH Mandiri Jaya belum dapat mencapai target diversifikasi potensi usaha dalam rencana kerja, produktivitas bibit yang belum maksimal, dan akses pemasaran yang terbatas. Hal ini berdampak pada tingkat keberdayaan masyarakat yang masih bergantung pada komoditas jagung sebagai sumber pendapatan utama. Posisi penyuluh kehutanan sebagai birokrat kelas tapak menjadi titik temu antara negara dan masyarakat sehingga penelitian tentang

“Analisis Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Mandiri Jaya di Kabupaten Semarang” dilihat dari manifestasi peran dalam implementasi kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendampingan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, dapat dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan terhadap pelaksanaan pendampingan terhadap pemberdayaan KTH, khususnya pada KTH Mandiri Jaya yang terdiri atas:

1. Ketimpangan jumlah penyuluh kehutanan yang aktif dengan KTH yang perlu diberdayakan.
2. Pemantauan terhadap rencana kerja KTH belum dilaksanakan sehingga pendampingan diversifikasi usaha di KUPS Mandiri Jaya II dan KUPS Mandiri Jaya III belum terwujud.
3. Pendampingan pengetahuan budidaya tanaman belum optimal sehingga produktivitas tanaman dari bibit yang diterima belum maksimal.
4. Keterbatasan jejaring usaha yang dibangun oleh penyuluh kehutanan berdampak pada akses pemasaran produk usaha KTH Mandiri Jaya.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran penyuluh kehutanan dalam melakukan pemberdayaan KTH Mandiri Jaya?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat keberhasilan peran penyuluh kehutanan dalam melakukan pemberdayaan di KTH Mandiri Jaya?

## 1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan peran penyuluh kehutanan dalam melakukan pemberdayaan kepada KTH Mandiri Jaya melalui proses pendampingan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan peran penyuluh kehutanan dalam melakukan pemberdayaan di KTH Mandiri Jaya.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam konsentrasi pemberdayaan sosial. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran birokrasi yang bekerja di tingkat tapak (*street-level bureaucracy*) dalam memenuhi tujuan pembangunan pada program perhutanan sosial.

### 1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti: Penelitian ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan teori-teori administrasi publik yang telah dipelajari ke dalam fenomena nyata di lapangan, khususnya mengamati peran penyuluh dan proses pemberdayaan masyarakat di KTH Mandiri Jaya.
2. Bagi Penulis Lain: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu serupa mengenai peran penyuluh kehutanan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan perhutanan sosial.

3. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi objektif bagi penyuluh kehutanan untuk memperbaiki kegiatan pendampingan yang dilakukan serta dasar perumusan kebijakan dalam perbaikan program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial.

## 1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu**

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suswadi, Norbertus Citra Irawan, dan Raniasari Bimanthi Esthi (2024)<br><br>Fostering Community Participation: The Role of Forestry Extension Officers in Maximizing Social Capital for National Park Conservation<br><br>Jurnal Sylva Lestari, 12(1), 54-75 | Meneliti dampak modal manusia dan modal sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam program kemitraan konservasi dengan peran petugas penyuluhan sebagai mediator | Variabel:<br>1. Modal manusia (*human capital*)<br>2. Modal sosial (*social capital*)<br>3. Peran petugas penyuluhan (*extension officer's role*)<br>4. Partisipasi masyarakat dalam program kemitraan konservasi | Pendekatan: Kuantitatif<br><br>Pengumpulan Data: Survei, *interview*, dan observasi<br><br>Analisis Data: Statistik dengan SEM-PLS untuk meneliti intensitas hubungan antar variabel dan faktor | **Ketersediaan sumber daya**, **dukungan institusional**, dan **saluran komunikasi** memiliki dampak yang lebih signifikan untuk meningkatkan efisiensi petugas. Penyuluh memainkan peran sebagai **perantara**, **memfasilitasi** komunitas, **memotivasi** partisipasi, dan **mengorganisir** kegiatan. | Penelitian oleh Suswadi membahas tentang pengaruh modal manusia dan modal sosial terhadap partisipasi masyarakat dengan peran penyuluh sebagai variabel mediasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Sedangkan penelitian ini akan membedah kinerja penyuluh kehutanan secara lebih spesifik dalam pemberdayaan KTH Mandiri Jaya pada program PS. |
| 2. | E.D. Udoh, B.I. Ogar, I.E. Ema, E.O. Samson (2025) | Mengevaluasi layanan penyuluhan | Variabel: | Pendekatan: Kuantitatif | Akses petani terhadap penyuluhan memiliki interaksi yang rendah. | Penelitian oleh Udoh melakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan penyuluhan kehutanan di Cagar Hutan |

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Assessment of Forestry Extension Service Delivery among Rural Farmers Living around Awi Forest Reserve in Cross River State, Nigeria<br><br>Journal of Applied Science and Environmental Management, 29(1), 197-204 | kehutanan di kalangan petani pedesaan yang tinggal di sekitar kawasan konservasi Hutan Awi di Negara Bagian Cross River, Nigeria. | 1. Karakteristik sosio-ekonomi responden<br>2. Akses petani pedesaan terhadap layanan penyuluhan<br>3. Layanan penyuluhan yang diberikan kepada petani | Pengumpulan Data: Kuesioner terstruktur.<br><br>Analisis Data: Statistik dengan skala likert | Peningkatan frekuensi interaksi dapat dilakukan **penambahan jumlah petugas penyuluhan**, **penggunaan alat berbasis IT** untuk interaksi jarak jauh, dan **mendorong pendekatan partisipatif**. Pelayanan penyuluhan terkait dengan kampanye, praktik agroforestri, dan informasi hukum sudah berjalan baik meskipun **demonstrasi metode/hasil**, **pelatihan penanaman bibit**, dan **distribusi bibit** hortikultura mendapat kepuasan yang rendah. Hambatan yang dirasakan paling besar adalah jumlah **petugas penyuluhan yang tidak memadai**, **kurangnya dana** untuk penyuluhan, dan **pengawasan yang tidak** | Awi, Nigeria dengan fokus pada kepuasan petani terhadap indikator layanan dasar. Meskipun penelitian ini juga mengukur kinerja melalui kepuasan petani, peran penyuluh dibedah secara spesifik menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero ke dalam dimensi fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis pada skema PS di KTH Mandiri Jaya untuk mengukur kontribusi penyuluh kehutanan terhadap pemberdayaan kelompok. |

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **memadai** kepada petugas di lapangan. | |
| 3. | Leila Mahdavi, Fatemeh Hashemi, and Sahar Yazdani (2024)<br><br>Forest-Dependent Communities and Livelihood Diversification: A Case Study<br><br>Journal of Selvicoltura Asean, 1(6), 259-270 | Mengkaji strategi yang diterapkan oleh komunitas yang bergantung pada hutan dalam upaya diversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya hutan. | Kesuksesan strategi diversifikasi (Rad et.al., 2020)<br>1. Pengetahuan lokal (*local knowledge*)<br>2. Jaringan sosial (*social networks*)<br>3. Ketersediaan sumber daya alternatif | Pendekatan: Kualitatif<br><br>Pengumpulan Data: Wawancara semi-terstruktur dan FGD<br><br>Analisis Data: Tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama diversifikasi | Hasil ini menunjukkan urgensi **pengetahuan lokal** dan **jaringan sosial** yang didorong oleh komunitas untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian. Pembuat kebijakan perlu menciptakan **fasilitasi akses ke pasar**, **pelatihan**, dan **sumber daya** bagi komunitas melalui praktik berkelanjutan dan kewirausahaan lokal. | Penelitian oleh Mahdavi mengkaji tentang strategi diversifikasi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan melalui pengetahuan lokal, jaringan sosial, dan ketersediaan sumber daya alternatif untuk mendorong peralihan usaha dengan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada peran eksternal birokrasi, yaitu penyuluh kehutanan untuk menyediakan akses pasar dan sumber daya melalui pendekatan *mix method sequential exploratory*. |
| 4. | Andi Nur Imran, Muliana Djafar, and Andi Khairil A. Samsu (2024)<br><br>Forestry Extension Performance in Enhancing Forest | Mengevaluasi kinerja petugas penyuluh kehutanan di Kabupaten Tompobulu | Layanan Penyuluhan:<br>1. Penyusunan peta pemanfaatan produk hutan<br>2. Penyusunan program kerja tahunan | Pendekatan: Kuantitatif<br><br>Pengumpulan Data: Kuesioner | Berdasarkan rincian peran yang dilakukan oleh petugas penyuluh kehutanan, terdapat beberapa kinerja yang belum berperan secara signifikan kepada anggota KTH yang terdiri atas fasilitasi **peningkatan** | Penelitian oleh Imran mengevaluasi kinerja penyuluh kehutanan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros melalui sembilan indikator kinerja teknis. Penelitian ini menggabungkan beberapa kinerja tersebut ke dalam empat dimensi |

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Farmer Knowledge and Skills: A Case Study in Tompobulu, Maros Regency<br><br>Wasian Journal, 11(1), 27-38 | | 3. Peningkatan kualitas SDM<br>4. Informasi teknologi produk hutan<br>5. Pemberdayaan dan kemandirian<br>6. Kemitraan bisnis<br>7. Akses modal usaha<br>8. Peningkatan hasil produksi unggulan<br>9. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Analisis Data: Statistik skala likert | **pendapatan dan kesejahteraan**, fasilitasi **kemitraan bisnis**, dan fasilitasi **akses modal usaha**. | peran, yaitu fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis dengan indikator pendampingan kelembagaan, kawasan, dan usaha berdasarkan regulasi sebagai bentuk pemberdayaan. |
| 5. | Dewi Retna Indrawati, Dody Yuliantoro (2022)<br><br>Peran Penyuluh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | Mengetahui peran penyuluh terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS | Peran Penyuluh (Suprayitno, 2011):<br>1. Pendidik<br>2. Fasilitator<br>3. Mediator | Pendekatan: Mix-method<br><br>Pengumpulan Data: Kuesioner, *in-depth interview*, dan observasi | Peran penyuluh sebagai pendidik, mendapat skor yang cukup tinggi terkait dengan **frekuensi penyuluhan, materi penyuluhan, partisipasi** dalam konservasi tanah dan air (KTA). Sebagai fasilitator, tindak lanjut pembinaan dan | Penelitian oleh Indrawati mengevaluasi peran penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan DAS Keduang melalui pendekatan mix method dengan teori Suprayitno yang mencakup pendidik, fasilitator, dan mediator. Penelitian ini melakukan modifikasi dengan menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero yang dapat membedah peran penyuluh kehutanan secara lebih |

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 6(1), 130-141 | | | Analisis Data: Tabulasi skor | **pengambilan keputusan** oleh masyarakat masih **rendah** karena keputusan dilakukan oleh pemimpin desa. Peran sebagai **mediator belum dijalankan secara optimal** karena belum tersedianya jejaring dengan para pihak. | komprehensif pada program PS di KTH Mandiri Jaya. |
| 6. | Rahma Wilda Kusuma Dewi, Hendro Prasetyo, dan Alia Fibriningtyas (2023)<br><br>Peran Penyuluh Terhadap Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (Kasus Di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri) | Mengidentifikasi peran penyuluh dan hubungannya terhadap peningkatan kelas kelompok tani. | Peran Penyuluh:<br>1. Fasilitator<br>2. Inovator<br>3. Motivator<br>4. Dinamisator<br>5. Edukator<br><br>Perkembangan Kelompok Tani:<br>1. Kemandirian Kelompok Tani<br>2. Kemampuan Anggota Kelompok Tani<br>3. Kemampuan Kelompok Tani | Pendekatan: Kuantitatif<br><br>Pengumpulan Data: Kuesioner dan observasi<br><br>Analisis Data: Statistik Rank Spearman | Hasil penelitian terhadap peran penyuluh mendapatkan kategori tinggi dengan fasilitator meraih nilai paling tinggi karena **frekuensi pertemuan yang rutin** dirasa mampu membantu pengembangan usaha petani. Pada aspek kemandirian, kelembagaan KTH sudah memiliki pondasi yang kuat meskipun sistem **administrasinya lemah**. KTH juga telah memiliki **partisipasi dalam pengambilan keputusan** | Penelitian oleh Dewi berfokus pada analisis hubungan antara peran penyuluh pertanian terhadap peningkatan kelas kemampuan kelompok tani di Desa Branggahan, Kediri dengan menggunakan lima dimensi peran, yaitu fasilitator, inovator, motivator, dinamisator, dan edukator. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menentukan lokus penelitian, yaitu KTH Mandiri Jaya melalui program PS dan teori dengan dimensi fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis untuk mengevaluasi kinerja penyuluh kehutanan. |

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 7(2), 493-504 | | dalam Menjalankan Fungsi | | budidaya pertanian. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh ketersediaan keterampilan dan keahlian, pembagian tugas, jalinan kerjasama, dan evaluasi kegiatan. | |
| 7. | Sekar Inten M, Dewi Elviana CCW dan Budi Rosen Nover S (2017)<br><br>Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Komoditas Padi Di Kecamatan Tanjungselor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara<br><br>Jurnal AGRIFOR, 16(1), 103-108. | Penelitian memiliki tujuan untuk menentukan peran penyuluh pertanian, tingkat pendapatan petani padi, dan pengaruh peran penyuluh pertanian terhadap pendapatan petani | Peran Penyuluh Pertanian:<br>1. Pembimbing<br>2. Pemantau dan Pengevaluasi<br>3. Fasilitator<br>4. Konsultan | Pendekatan: Kuantitatif<br><br>Pengumpulan Data: Survei<br><br>Analisis Data: Statistik skala likert | Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan kehadiran penyuluh berperan dalam mengembangkan produktivitas tani. Penyuluhan dilakukan dengan menyamakan persepsi antara penyuluh dan pihak yang berkepentingan untuk mengubah perilaku petani melalui sikap, keterampilan, dan pengetahuan.<br><br>Selanjutnya, 69,6% masyarakat menyatakan | Penelitian oleh Sekar Inten berfokus pada peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani komoditas padi di Kecamatan Tanjungselor melalui dimensi pembimbing, pemantau dan pengevaluasi, fasilitator, dan konsultan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran penyuluh kehutanan menggunakan pendekatan pembangunan masyarakat melalui dimensi fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero untuk menilai pemberdayaan yang dilakukan di KTH Mandiri Jaya. |

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | bahwa penyuluh banyak memberikan bimbingan, evaluasi kegiatan petani, memfasilitasi usaha tani, dan konsultasi permasalahan. | |
| 8. | Ejeje Igwe Agube, Edwin M. Igbokwe, Oluwasegun Felix Ojo (2021)<br><br>Role of Forest Extension Officers in Forest Conservation in Cross River State, Nigeria<br><br>Journal of Agricultural Extension, 25(3), 69-80. | Mengevaluasi peran petugas penyuluhan kehutanan dalam konservasi hutan di negara bagian Cross River, Nigeria | Indikator Evaluasi:<br>1. Efektivitas peran penyuluhan dalam konservasi hutan.<br>2. Kebutuhan pelatihan petugas kehutanan.<br>3. Hambatan penyuluhan. | Pendekatan: Kuantitatif<br><br>Pengumpulan Data: Interview<br><br>Analisis Data: Statistik skala likert | Hasil penelitian terhadap efektivitas peran penyuluhan menunjukkan bahwa penyampaian layanan seperti membantu petani dalam **praktik agroforestri** dan pendidikan terhadap **ilegalitas deforestasi** masih kurang. Hambatan penyuluhan terbesar dipengaruhi oleh **pendanaan yang tidak memadai**, kurangnya kendaraan logistik, **kekuatan staf tidak memadai**, struktur gaji dan insentif yang buruk, serta ketidakstabilan kebijakan. | Penelitian oleh Agube mengevaluasi efektivitas peran penyuluh kehutanan dalam konservasi hutan di Negara Bagian Cross River, Nigeria dengan menitikberatkan pada aspek konservasi dan pencegahan deforestasi. Sedangkan penelitian ini melakukan analisis peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat di KTH Mandiri Jaya melalui program PS dengan dimensi fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis dalam pendampingan kelembagaan, kawasan, dan usaha. |

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Amanda Anindya, Yusuf Hidayat, Yuli Apriati (2019)<br><br>Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Jalan Ahmad Yani KM 29,6 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru<br><br>Jurnal Pendidikan Sosial Antropologi, 1(2), 97-106 | Penelitian dilakukan untuk melihat pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan pekerja sosial serta peran oleh pekerja sosial. | Variabel:<br>1. Pendidik<br>2. Pendamping<br>3. Perantara<br>4. Mediator | Pendekatan: Kualitatif<br><br>Pengumpulan Data: Interview<br><br>Analisis Data: Purposive sampling | Hasil penelitian melihat peran sebagai **pendidik dilakukan untuk memberikan pengajaran** materi atau pengetahuan sebagai bekal saat keluar dari panti. Peran **pendamping dilakukan untuk memastikan** bahwa **kegiatan** pelayanan dan rehabilitasi sosial berjalan **sesuai dengan tujuan** yang diharapkan. Peran **perantara dilakukan oleh pekerja sosial dalam menghubungkan** penerima manfaat dengan bantuan layanan kesehatan. Terakhir, **peran mediator dilakukan untuk memberikan solusi** terhadap permasalahan yang dimiliki oleh penerima manfaat. | Penelitian oleh Anindya mengevaluasi peran pekerja sosial di Panti Sosial Bina Laras dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui dimensi pendidik, pendamping, perantara, mediator. Sedangkan penelitian ini mengevaluasi kinerja peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan di KTH Mandiri Jaya dengan metode kuantitatif deskriptif melalui teori Jim Ife dan Frank Tesoriero dengan dimensi fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis. |

| No. | Identitas Penelitian | Tujuan Penelitian | Landasan Teori | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Dian Ayuningtyas, Hesti Lestari, Dewi Rostyaningsih (2023)<br><br>Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah<br><br>Journal of Management and Public Policy, 12(3), 13-31 | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran. | Variabel Peran:<br>1. Animasi Sosial<br>2. Mediasi dan Negosiasi<br>3. Pemberi Dukungan<br>4. Fasilitator Kelompok<br>5. Pemanfaatan Sumber Daya dan Keterampilan<br>6. Mengorganisasi | Pendekatan: Kualitatif<br><br>Pengumpulan Data: Interview, observasi, dokumentasi<br><br>Analisis Data: Deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai **animasi sosial**, **pemberi dukungan**, **fasilitator**, dan ***organizer*** belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pendanaan yang dimiliki, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, serta belum ada peraturan yang dirumuskan terkait desa wisata. | Penelitian oleh Ayuningtyas menganalisis peran pemerintah desa dalam melakukan pengembangan desa wisata edukasi gerabah melalui peran fasilitatif oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero dengan dimensi animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, fasilitator, serta pengorganisasi dalam sektor pariwisata. Sedangkan penelitian ini mengevaluasi peran penyuluh kehutanan melalui seluruh dimensi peran, yaitu fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis dalam pendampingan kelembagaan, kawasan, dan usaha KTH Mandiri Jaya sebagai upaya pemberdayaan. |

*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)*

Tabel 1.5 di atas telah mengumpulkan sepuluh artikel yang digunakan sebagai referensi penelitian tentang perhutanan sosial, teori peran pekerja sosial, dan evaluasi kinerja penyuluh. Penelitian terdahulu yang digunakan berasal dari dua artikel internasional dan delapan artikel nasional. Artikel dipilih melalui metode *clustering*, yaitu menggunakan studi literatur lintas konsep untuk memperkaya pemahaman tentang penelitian yang akan diangkat. Berdasarkan analisis, kinerja penyuluh kehutanan secara umum belum berjalan dengan maksimal. Beberapa kendala seperti belum adanya demonstrasi terhadap praktik agroforestri, pelatihan terhadap penanaman dan distribusi bibit, fasilitasi akses terhadap kemitraan bisnis dan modal usaha, serta kontrol dalam pengambilan keputusan berusaha masih rendah menjadi tantangan yang dihadapi.

Kondisi ini memunculkan beberapa peran yang diharapkan dari penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu fasilitator, pendidik, motivator, mediator, organisator, edukator, inovator, dan dinamisator sebagai seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyuluhan pengelolaan hutan. Meskipun penelitian tentang peran penyuluh dalam aspek kelembagaan, kawasan, dan usaha sudah banyak dilakukan, terdapat celah penelitian yang belum dikaji. Penelitian terdahulu umumnya melakukan evaluasi menggunakan indikator kinerja teknis atau standar operasional program. Penelitian ini mengisi celah teoritis dengan perspektif peran pembangunan masyarakat oleh Ife dan Tesoriero (2008) untuk membedah dinamika multi-peran penyuluh kehutanan sebagai *street-level bureaucrat* dalam menghadapi dilema stagnasi tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha pasca-izin perhutanan sosial melalui pendampingan peningkatan kelas KTH.

### 1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan proses penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan serta layanan publik. Awalnya, administrasi publik didefinisikan sebagai ilmu pemerintahan sebagai akibat dari tidak adanya makna yang tepat untuk menggambarkan disiplin ilmu ini. Namun, seiring berjalannya waktu, lokus dan fokus dari administrasi publik semakin terlihat ketika paradigma *governance* muncul pada tahun 1990. Pasolong (2011) mendefinisikan administrasi publik sebagai kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam naungan pemerintah yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk mencapai tujuan pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Administrasi publik menurut Hughes (1994) dalam Malawat (2022) adalah aktivitas dalam melayani publik atau aktivitas yang dilakukan pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh pihak lain. Denhardt and Denhardt (2003) menambahkan bahwa tujuan utama dari adanya administrasi publik adalah untuk kepentingan publik (Widiastuti, 2025). Konsep ini menjelaskan bahwa studi administrasi publik memusatkan perhatiannya kepada kepentingan publik dan berusaha untuk melaksanakan tugasnya tersebut secara efisien dan berkeadilan sosial. Gray (dalam Pasolong, 2011) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat adalah menjamin pemerataan distribusi pendapatan, melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin kebebasan, serta melestarikan nilai-nilai tradisi dan menjamin dukungan terhadap sumber yang diperlukan.

Negara sebagai aktor penting yang memegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, administrasi publik dipandang sebagai instrumen negara untuk mengelola sumber daya kehutanan dan memberdayakan masyarakat. Penyuluh kehutanan merupakan bagian dari birokrasi yang bertugas menerjemahkan kebijakan makro terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjadi aksi nyata di tingkat tapak melalui pelayanan dan pendampingan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH).

### 1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan ilmu administrasi publik mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dalam memandang hubungan antara negara dan masyarakat. Paradigma menurut Robert T. Golembiewski (dalam Pasolong, 2011) adalah standar dari suatu disiplin ilmu yang dinilai dari lokus dan fokusnya. Fokus merupakan apa yang menjadi kajian dan cara pemecahan masalah melalui ilmu dan lokus berkaitan dengan lokasi dari penerapan ilmu pengetahuan tersebut. Nicholas Henry (dalam Suwitri, 2008) membagi paradigma administrasi publik ke dalam lima tahap, yaitu:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

   Frank J. Goodnow dan Leonald D. White dalam bukunya yang berjudul *Politics and Administration* (1900) berpendapat bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan administrasi. Fungsi politik berkaitan dengan penetapan kebijakan atau tujuan dan

keinginan negara sedangkan fungsi administrasi adalah melaksanakan kebijakan dan tujuan negara yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi politik. Paradigma ini menempatkan administrasi negara pada birokrasi pemerintahan untuk memecahkan permasalahan organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi. Fungsi politik dilaksanakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif.

2. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

   Paradigma ini muncul untuk melakukan pencarian terhadap prinsip agar pelaksanaan pencapaian tujuan dan keinginan negara dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada masa ini, administrasi negara mencapai puncak reputasi karena memiliki prinsip yang jelas sebagaimana dicetuskan oleh Luther H. Gullick dan Lyndall Urwick (1937) yang disebut sebagai POSDCORB, yaitu *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *controlling*, *reporting*, dan *budgeting*. Prinsip administrasi yang dikembangkan dapat diterapkan secara universal sehingga fokus memegang peranan lebih penting dibandingkan lokus.

3. Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

   Fase ini menjadi usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Herbert Simon menyatakan bahwa ilmu politik berfungsi untuk menciptakan struktur yang kondusif pada masyarakat dalam rangka membangkitkan perubahan politik dan sosial agar implementasi kebijakan berjalan sesuai harapan. Pemikiran ini merupakan cikal bakal dari perkembangan ilmu kebijakan publik dan

mengembalikan eksistensinya sebagai bagian dari ilmu politik yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

   Paradigma ini muncul karena adanya ketidakpuasan sarjana administrasi negara terhadap ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Ilmu administrasi adalah studi gabungan dari teori organisasi dan ilmu manajemen. Pada fase ini, teori organisasi menggunakan teori sosial, administrasi niaga, administrasi negara, dan sosiologi untuk mempelajari tingkah laku organisasi. Sedangkan ilmu manajemen digunakan untuk mengidentifikasi perilaku organisasi. Lokus pada paradigma ini berada pada organisasi publik.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (Setelah 1970)

   Pada fase ini, administrasi negara menemukan lokus utama penerapan ilmu berada pada organisasi publik. Ilmu administrasi negara telah berkembang menjadi sebuah ilmu yang melakukan kajian terhadap teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik. Administrasi negara tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik yang memiliki peran dalam proses kebijakan sesuai batas kewenangan masing-masing. Henry menilai bahwa paradigma ini menggunakan fokus teori organisasi

dan ilmu manajemen dengan lokus pada kepentingan (*public interest*) dan masalah publik (*public affairs*).

### 1.6.4 Manajemen Publik

Nor Ghofur (dalam Malawat, 2022) mengartikan manajemen publik sebagai kegiatan yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan ini selalu dibutuhkan, terutama pada organisasi publik untuk dapat menjalankan program yang mencerminkan kehendak masyarakat (Sudarmanto *et al.*, 2020). Konsep manajemen publik dalam administrasi publik disebut dengan *New Public Management* (NPM) yang menggunakan pendekatan manajemen pada sektor privat ke dalam sektor publik.

Dalam pendekatan NPM, anggota organisasi yang secara langsung menyediakan barang publik dan berinteraksi dengan masyarakat merupakan bagian terpenting dalam struktur organisasi (Wicaksono, 2014). Pihak tersebut dikenal sebagai *street-level bureaucrat* dan memandang publik atau masyarakat sebagai target dari pelayanan pemerintah. Selanjutnya, konsep NPM berkembang dalam bentuk yang lebih progresif menjadi *Reinventing Government* yang disusun oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992). Dalam bukunya yang dikutip oleh Wicaksono (2014), konsep ini mengharapkan adanya perubahan perilaku dari aparatur negara untuk dapat beradaptasi guna bekerjasama dengan semua pihak. Berikut adalah sepuluh prinsip pemerintahan wirausaha dalam konsep *Reinventing Government* (1992).

1. Catalytic Government: Steering Rather Than Rowing.
2. Community Owned Government: Empowering Rather Than Serving.
3. Competitive Government: Injecting Competition into Service Delivery.
4. Mission Driven Government: Transforming Rule Driven Organization.
5. Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Inputs.
6. Customer Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy.
7. Enterprising Government: Earning Rather Than Spending.
8. Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure.
9. Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork.
10. Market Oriented Government: Leveraging Change Through The Market.

Penelitian ini termasuk dalam ranah manajemen publik, khususnya paradigma *Reinventing Government* yang memposisikan *street-level bureaucrat* sebagai aktor sentral dalam pemberdayaan warga negara. Produk yang diberikan oleh seorang penyuluh kehutanan melalui prinsip ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Di sektor kehutanan, prinsip penyuluhan berjalan selaras dengan sektor pertanian di mana menjadi sektor jasa yang menawarkan pelayanan publik non-formal dan memberikan informasi teknis dan edukasi kepada petani dan pihak lain yang membutuhkan (Darmawati dan Ningrum, 2020). Paradigma ini menuntut birokrat tingkat bawah bertransformasi menjadi katalisator untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis pemberdayaan komunitas melalui penguatan kapasitas ekonomi lokal yang berkelanjutan.

### 1.6.5 Peran

Poerwodarminta (dalam Zulkarnaini, 2022) menyatakan peran sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Pola perilaku yang dimiliki oleh seseorang dengan posisi tertentu dapat membawa perubahan yang bermanfaat. Artinya, perilaku peran adalah perilaku sesungguhnya yang dilakukan dan timbul dari suatu jabatan tertentu (Soekanto dalam Zulkarnaini, 2022). J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (dalam Wiyanto, 2023) menyatakan bahwa peran dapat digunakan untuk membimbing seseorang dalam berperilaku. Teori ini memiliki harapan kepada kedudukan seseorang untuk dapat memenuhi peran yang dimiliki. Kehadiran peran dapat menjadi cerminan posisi seseorang dalam sistem sosial sekaligus hak dan tanggung jawab yang menyertainya (Ayuningtyas *et al.*, 2023). Berdasarkan pelaksanaannya, peranan sosial di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua jenis.

1. Peran yang diharapkan (*expected roles*). Peran ini menghendaki adanya pemenuhan terhadap peranan yang diharapkan dengan melaksanakan sesuai dengan yang ditentukan.
2. Peran yang disesuaikan (*actual roles*). Peran ini dilaksanakan dengan adanya penyesuaian terhadap situasi dan kondisi tertentu. Meskipun berpotensi tidak cocok dengan situasi setempat, kekurangan yang muncul bisa dianggap wajar oleh masyarakat.

Berdasarkan definisi peran yang telah disampaikan, konsep ini memandang kemunculan peran berasal dari kedudukan atau posisi tertentu yang hadir di masyarakat. Penyuluh kehutanan sebagai birokrat garda depan dalam

pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang diharapkan untuk mengubah perilaku petani melalui sikap, keterampilan, dan pengetahuan agar mampu melaksanakan program secara mandiri.

### 1.6.6 Penyuluh Kehutanan

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya melibatkan *top level* dalam pemerintahan tetapi birokrat pada tingkat tapak (*street level bureaucracy*) turut memiliki kontribusi yang tinggi (Suryono, Nurcahyanto and Marom, 2024). Michael Lipsky (Siwi and Pangestuti, 2025) melihat *street-level bureaucracy* memiliki peran tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan tetapi pembuat kebijakan dalam praktik. Mereka adalah seseorang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mengubah kebijakan publik menjadi tindakan konkret (Isla, 2022). Pada penelitian ini, penyuluh kehutanan memiliki peran krusial terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat kelompok tani hutan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial.

Penyuluh kehutanan adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki fungsi dalam melaksanakan penyuluhan. Lippit dan Rogers (dalam Fauzi, 2017) menggolongkan pekerjaan ini sebagai agen perubahan yang berperan dalam mempengaruhi proses penetapan keputusan masyarakat untuk menerima dan mengimplementasikan inovasi. Seorang penyuluh kehutanan diharapkan mampu menguasai sistem penyuluhan kehutanan, yaitu inovasi pembelajaran di sektor kehutanan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan teknologi (Imran *et al.*, 2024). Kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada program perhutanan sosial

membantu masyarakat meningkatkan hasil produksi yang nantinya akan berkontribusi terhadap pendapatan mereka (Hujani *et al*., 2019).

Mardikanto dan Listiana (dalam Indrawati and Yuliantoro, 2022) mendefinisikan penyuluhan sebagai sebuah proses pembelajaran dan penguatan kapasitas masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh agar mampu menolong dirinya, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya. Penyuluh menjadi mitra sejajar petani yang memiliki peran strategis dalam pembangunan (Illahi, Meilani and Rini, 2023). Hal ini yang membuat profesi penyuluh kehutanan dikategorikan sebagai pekerja sosial karena berfungsi untuk meningkatkan keberfungsian sosial, yaitu dapat melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, merealisasikan aspirasi, dan memecahkan masalah (Astuty dalam Shabrina *et al.*, 2022).

### 1.6.7 Peran Penyuluh Kehutanan

Penyuluhan kehutanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan, keterampilan, dan informasi teknis yang diperlukan oleh pelaku utama maupun pelaku usaha untuk mendukung pengembangan kehutanan yang ramah lingkungan (Vihi, Daudu and Anonguku, 2020). Kegiatan penyuluhan di Indonesia tidak hanya dilakukan pada sektor kehutanan tetapi mencakup pertanian dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Penyuluh berperan sebagai tempat konsultasi dan pendampingan dalam mengembangkan usaha sehingga adopsi teknologi tepat guna dapat berjalan dengan baik dan pemberdayaan dapat terwujud (Anwarudin *et al.*, 2021).

Fungsi sistem penyuluhan secara spesifik telah tercantum dalam pasal 4 disebutkan yang terdiri atas: (1) membantu menganalisis, memecahkan masalah,

serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani dalam mengelola usaha, (2) memfasilitasi proses pembelajaran dalam tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan, (3) membantu petani mengembangkan usahanya agar mampu produktif dan memiliki daya saing, (4) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan petani, (5) mengupayakan akses ke sumber informasi, teknologi, dan sumber lain dalam pengembangan usaha serta pengawalan peningkatan produksi dan produktivitas petani, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan, serta (7) melembagakan nilai budaya pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

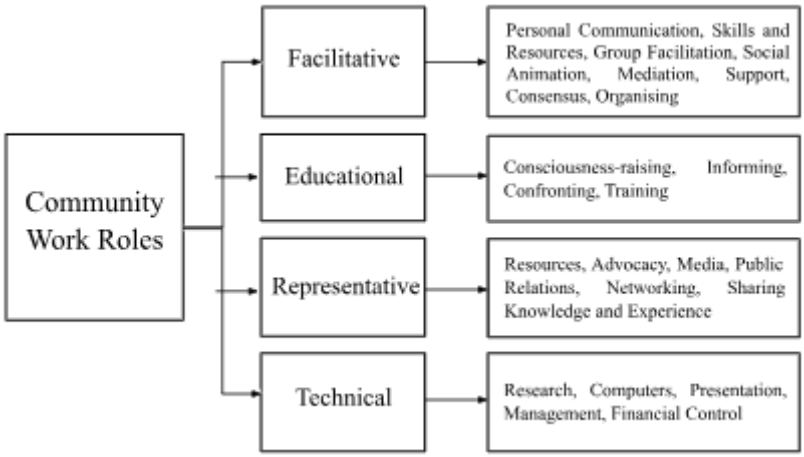
Berdasarkan fungsi penyuluhan secara umum, ditemukan beberapa peran yang relevan untuk mengidentifikasi kinerja penyuluh dalam kegiatan pemberdayaan. Lippit, Watson dan Weasley (dalam Anwarudin *et al.*, 2021) melihat kehadiran penyuluh sebagai seorang agen perubahan yang mendampingi masyarakat untuk menerima perubahan yang akan dilakukan. Dalam membantu masyarakat, seorang penyuluh hadir di setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar masyarakat dapat memiliki kekuatan dalam menjalankan program. Peran pertama yang akan dikaji dalam penelitian ini menggunakan perspektif pembangunan masyarakat yang ditemukan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008).

Dalam bukunya yang berjudul *Community Development: Community Based Alternatives in An Age of Globalisation* (2008), Ife dan Tesoriero memandang pekerjaan sosial sebagai kegiatan atau praktik seseorang yang berusaha memfasilitasi proses pengembangan komunitas. Dalam praktiknya, pekerja sosial

dituntut untuk memiliki integrasi antara refleksi kritis, analisis, dan tindakan yang mengevaluasi pelaksanaan teori melalui pengalaman di lapangan. Hal ini akan membantu praktisi memahami komunitas, masyarakat, dan perubahan sosial yang dialami. Pekerjaan di bidang kemasyarakatan umumnya melibatkan banyak peran sekaligus dengan memanfaatkan berbagai keterampilan yang dibagi dalam empat klaster, yaitu peran fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis.

1. Peran fasilitatif berkaitan dengan peran yang berfokus pada merangsang dan mendukung pengembangan komunitas. Adapun keterampilan yang dibutuhkan terdiri atas animasi sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan keterampilan dan sumber daya, mengorganisasi, serta komunikasi pribadi.
2. Peran edukasional mewajibkan seorang pekerja sosial untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam penetapan agenda komunitas yang mampu menghasilkan terbentuknya perubahan sikap kelompok. Beberapa keterampilan yang relevan adalah peningkatan kesadaran, pemberian informasi, konfrontasi, dan pelatihan.
3. Peran representatif mengharuskan seorang pekerja sosial terlibat dalam interaksi dengan lembaga eksternal yang mengatasnamakan kebutuhan kelompok. Kemampuan yang dibutuhkan terhadap peran ini adalah menyediakan sumber daya, advokasi, menggunakan media, hubungan masyarakat dan presentasi publik, membangun jejaring, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman.

4. Peran teknis digunakan untuk mendukung proses pengembangan masyarakat melalui keahlian dan kemampuan dalam aspek operasional dan teknis yang dimiliki oleh pekerja sosial, seperti penelitian, menggunakan komputer, presentasi verbal dan tertulis, manajemen, serta pengendalian keuangan. Adapun peran pekerja sosial beserta keterampilannya tersaji dalam gambar 1.2 berikut.




**Gambar 1.2 Peran Pekerja Sosial**

*Sumber: Ife & Tesoriero (2008)*

Selain perspektif pekerja sosial, peran penyuluh kehutanan juga dapat dikaji melalui perspektif peran penyuluh pertanian yang disampaikan oleh Mardikanto (1993) yang dikutip oleh Anwaruddin *et al.* (2021). Dalam bukunya yang berjudul Sistem Penyuluhan Pertanian (2021), tujuan dari kehadiran penyuluh pertanian adalah untuk mendampingi dan tempat konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnisnya sehingga dapat menjalankan adopsi teknologi tepat guna dengan baik. Dengan adanya penerimaan terhadap adopsi teknologi maka pelaku utama dapat berdaya melalui peningkatan produksi,

produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Oleh karena itu, penyuluh pertanian memiliki sembilan peran menurut Mardikanto (1993) sebagai berikut.

1. Penyuluh sebagai inisiator yang selalu memberikan gagasan baru.
2. Penyuluh sebagai fasilitator untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha taninya.
3. Penyuluh sebagai motivator mendorong kelompok sasaran untuk tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan.
4. Penyuluh sebagai penghubung berfungsi sebagai penyampai aspirasi, kebijakan, dan regulasi yang menyangkut kegiatan pertanian sehingga dapat membawa inovasi baru guna memajukan usaha tani.
5. Penyuluh sebagai guru membimbing petani untuk dapat mengubah perilakunya dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar memiliki usaha tani yang lebih terarah.
6. Penyuluh sebagai penasehat berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap alternatif perubahan yang menguntungkan secara ekonomi dan diterima oleh sosial budaya masyarakat setempat.
7. Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator berfungsi untuk mengembangkan kelompok tani agar mampu digunakan sebagai tempat belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi.
8. Penyuluh sebagai penganalisa membantu menganalisa kebutuhan dan permasalahan petani yang dapat menjadi program penyuluhan di kelompok tersebut.

9. Penyuluh sebagai agen perubahan berfungsi sebagai katalisator yang membantu petani memecahkan masalah, mendampingi proses, dan menjadi penghubung kerjasama.

Selain Mardikanto, Msuya dan Mkuki dalam penelitiannya yang berjudul *Agricultural Extension Officers Perception Towards Their Roles: A Case Study of Simiyu Region* (2020) membagi peran penyuluh pertanian ke dalam tujuh kategori, yaitu fasilitator, organisator, intermediasi atau penghubung, edukasional, teknis, konsultan, dan administratif. Di Tanzania, seorang penyuluh pertanian diamanatkan untuk menjalankan berbagai peran sesuai dengan deskripsi tugas mereka sehingga didapatkan deskripsi tugas berdasarkan beberapa literatur sebagai berikut.

1. Peran fasilitatif yang diteliti meliputi fasilitasi pembentukan kelompok, akses ke kredit, pasar, dan pemasok input.
2. Peran organisator terdiri atas perencanaan pemanfaatan lahan yang tepat, rencana program penyuluhan, partisipasi dalam evaluasi perkiraan produksi, dan menyelenggarakan pertemuan.
3. Peran penghubung digunakan untuk memastikan adanya hubungan di antara para pihak guna menerima keuntungan dari kerjasama yang dilakukan, khususnya dengan lembaga penelitian.
4. Peran edukator menekankan pada pendidikan terhadap penggunaan tanah dan air yang tepat dalam kegiatan pertanian.
5. Peran teknis berkaitan dengan pengetahuan penyuluh pertanian, seperti pengujian perkecambahan benih serta pengendalian hama tanaman dan tanaman pangan.

6. Peran konsultasi yang diteliti terdiri atas pemberian saran terhadap peningkatan produksi pertanian dan cara diversifikasi praktik pertanian.
7. Peran administratif dilakukan dengan melakukan pemungutan pajak, terlibat dalam koordinasi dan pengawasan program lain, memegang jabatan eksekutif di desa, serta evaluasi terhadap infrastruktur di wilayah tersebut.

**Tabel 1.6 Diskursus Teori Peran**

| Jim Ife & Frank Tesoriero (2008) | Mardikanto (1993) | Msuya dan Mkuki (2020) | Peneliti |
|---|---|---|---|
| 1. Fasilitatif<br>2. Edukasional<br>3. Representatif<br>4. Teknis | 1. Inisiator<br>2. Fasilitator<br>3. Motivator<br>4. Penghubung<br>5. Guru<br>6. Penasehat<br>7. Dinamisator dan organisator<br>8. Analis<br>9. Agen perubahan | 1. Fasilitator<br>2. Organisator<br>3. Penghubun<br>4. Edukator<br>5. Teknis<br>6. Konsultan<br>7. Administratif | 1. Fasilitatif<br>2. Edukasional<br>3. Representatif<br>4. Teknis |

*Sumber: Ife and Tesoriero (2008), Anwarudin et al. (2021) dan Msuya et al. (2020)*

Setelah melakukan analisis terhadap ketiga teori peran yang relevan digunakan pada Penyuluh Kehutanan di Kecamatan Bringin, penelitian ini akan menggunakan kerangka teori dari peran pekerja sosial oleh Ife dan Tesoriero (2008) sebagaimana tercantum dalam tabel 1.6. Pemilihan kerangka teori tersebut didasarkan pada kedudukan strategis *street-level bureaucrat* yang memiliki kesamaan peran dengan pekerja sosial dalam menjalin interaksi langsung dengan masyarakat (Wicaksono, 2014). Pendekatan melalui empat kategori peran, yaitu fasilitatif, edukasional, representatif, dan teknis akan memberikan analisis terhadap persepsi kelompok tani yang lebih mendalam dan dinamis.

Penggunaan kerangka teori oleh Ife dan Tesoriero (2008) mampu mengintegrasikan peran konvensional penyuluh sebagaimana dikemukakan oleh Mardikanto (1993) serta penelitian Msuya dan Mkuki (2020), seperti peran fasilitatif yang beririsan kuat dengan peran motivator, inisiator, dan organisator, peran edukasional selayaknya peran guru dan edukator, peran representatif dengan fungsi sebagai *broker* atau penghubung dan dinamisator, serta peran teknis yang relevan dengan peran analis, penasehat, konsultan, dan administratif. Selain itu, penggunaan peran ini didukung oleh Fauzan dalam Afriansyah *et al.* (2023) yang mewajibkan seorang pendamping dan fasilitator pemberdayaan memahami multi peran yang dimiliki, seperti fasilitator, edukator, representatif, dan teknis agar pemberdayaan berjalan sesuai tujuan.

### 1.6.8 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Suharto (2019) merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan sehingga memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif dalam meningkatkan pendapatan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini menjadi kegiatan yang sangat penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, khususnya pada daerah dengan potensi sumber daya yang melimpah tetapi menghadapi tantangan kemiskinan dan kesenjangan (Triono, 2025). Frederick A. Cleveland (dalam Handayani, Maesaroh and Widowati, 2021) melihat administrasi publik memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi.

Chamber (dalam Aidah, Maesaroh and Widowati, 2023) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah konsep pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama untuk membangkitkan daya masyarakat melalui dorongan, motivasi, dan kesadaran akan potensi untuk menumbuhkan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya hutan (Nugroho, 2025). Berdasarkan konsep, pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang sistematis dan terencana untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan. Adapun tiga tahap pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowiyoto (dalam Handayani, Maesaroh and Widowati, 2021) adalah:

1. Tahap penyadaran. Tahap ini memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa mereka memiliki potensi dan hak untuk mengembangkan potensi tersebut melalui motivasi dan pendampingan. Cara ini akan menciptakan iklim yang membentuk perilaku sadar dan peduli di masyarakat.
2. Tahap pengkapasitasan. Tahap ini bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan kepada masyarakat agar dapat mengelola peluang yang diberikan. Peningkatan kemampuan dapat dilakukan melalui lokakarya dan pelatihan.
3. Tahap pendayaan. Tahap ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan. Peran ini diberikan secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki hingga mampu untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan.

Penelitian ini memanfaatkan konsep pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada KTH Mandiri Jaya dalam program perhutanan sosial. Dharmawan (dalam Suharto, 2019) melihat upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa memberikan peluang kepada pihak yang memiliki kelembagaan dan kepentingan yang berbeda untuk berkolaborasi secara partisipatif. Program ini tidak hanya dirancang untuk memberikan akses terhadap lahan tetapi secara organik melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan (Lawasi, 2024). Penyuluh kehutanan sebagai pendamping memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendampingan guna menguatkan kapasitas kelembagaan agar dapat mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri (Lawasi, 2022).

### 1.6.9 Kelompok Tani Hutan

Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Fungsi utama dari adanya kelompok tani adalah sebagai sebuah proses belajar, kerja sama, dan unit produksi (Dewi *et al.*, 2023). Terbentuknya kelompok tani dapat didorong oleh kesadaran dan minat yang kuat untuk menciptakan penghasilan melalui sektor pertanian dan perkebunan. Kelompok ini menjadi salah satu pelaku utama yang menerima persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Perizinan yang diterima atas akses kelola masyarakat terhadap hutan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi (Hastanti, 2021).

Dalam rangka memaksimalkan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat, kegiatan pembinaan terhadap petani diperlukan untuk menunjang terwujudnya petani yang tangguh dan mampu mengelola usaha tani yang dimiliki

secara swadana dan swadaya (Abdullah *et al.*, 2021). Pusat Penyuluhan dalam Laporan Kinerja 2024 menyebutkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan atau pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing pelaku utama dan pelaku usaha. Indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan dapat ditandai dengan peningkatan KTH yang mandiri. Dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan pasal 16 membagi klasifikasi kelas KTH ke dalam tiga kelas, yaitu pemula, madya, dan utama. Untuk mencapai peningkatan kelas, kehadiran penyuluh kehutanan dalam melaksanakan pembinaan diperlukan.

Selanjutnya dalam pasal 20, pembinaan KTH dapat dilakukan melalui tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. Tata kelola kelembagaan pada kelompok tani berfungsi untuk menetapkan aturan main dalam mengelola kawasan dan usaha. Kehadiran penyuluh dapat membantu kelompok memiliki struktur organisasi yang jelas (Larasati *et al.*, 2021). Tata kelola kawasan melibatkan pemahaman seluruh anggota terhadap batas wilayah kelola dan pemanfaatan wilayah kelola yang sesuai dengan potensinya (Munthe *et al.*, 2024). Terakhir, tata kelola usaha penting agar kelompok mampu mengalami peningkatan pendapatan melalui pembentukan unit usaha (KUPS). Dalam penelitian ini, KTH Mandiri Jaya memiliki permasalahan dalam peningkatan usaha produktif perhutanan sosial dan pemanfaatan kawasan untuk konservasi. Sejalan dengan hal ini, penyuluh kehutanan diharapkan dapat memberikan penguatan dan pendampingan yang lebih intensif.

### 1.6.10 Perhutanan Sosial

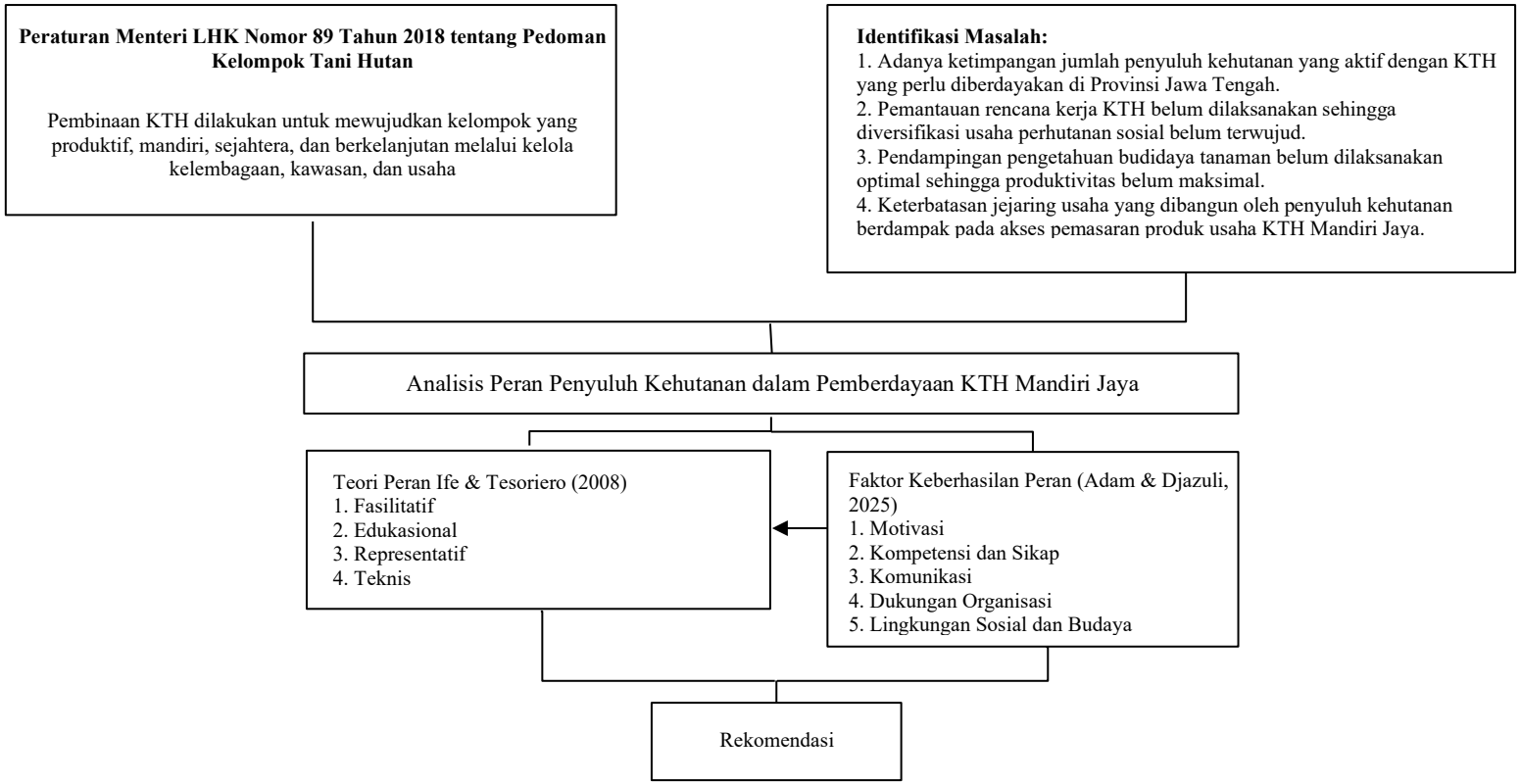
Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mendefinisikan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utamanya. Kebijakan ini secara khusus hadir untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat desa hutan memanfaatkan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan Kehutanan.

Salah satu kegiatan dalam pengelolaan perhutanan sosial adalah pendampingan. Kegiatan pendampingan perhutanan sosial dilakukan melalui prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan keterbukaan. Suharto (dalam Suswanto *et al.*, 2019) menyatakan bahwa pendampingan menjadi strategi keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan pendampingan yang diberikan oleh pendamping kepada masyarakat penerima perizinan perhutanan sosial meliputi pendampingan tahap awal, pengembangan pengelolaan kawasan dan lingkungan, kerjasama, akses permodalan, akses pasar, pengelolaan pengetahuan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pada penelitian ini, kebijakan perhutanan sosial ditempatkan sebagai salah satu program pembangunan kehutanan yang membantu mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Berdasarkan SK.2663/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2021 Amar Kedelapan ayat (3), KTH Mandiri Jaya selama

mengelola areal IPHPS memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dalam hal pemanfaatan areal izin, penyuluhan, pengembangan usaha, teknologi tepat guna, serta akses pembiayaan dan pemasaran. Kehadiran pendamping penting untuk mencapai keberhasilan program dalam mewujudkan tujuan perhutanan sosial, secara spesifik pada kesejahteraan masyarakat sekaligus mengelola kawasan hutan dengan lestari melalui penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani hutan.

## 1.7 Kerangka Berpikir




**Gambar 1.3 Kerangka Berpikir Penelitian**

*Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)*

## 1.8 Definisi Operasional

**Tabel 1.7 Definisi Operasional**

| No. | Variabel | Definisi Konsep | Dimensi | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pemberdayaan KTH | Peran penyuluh kehutanan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari pendamping untuk memfasilitasi proses pengembangan masyarakat. Mengacu pada Ife & Tesoriero (2008), peran ini mencakup upaya fasilitasi, edukasi, perwakilan, dan teknis untuk memberdayakan kelompok tani hutan. | 1. Peran Fasilitatif<br><br>Peran fasilitatif adalah peran penyuluh yang digunakan untuk memberikan stimulasi, dukungan, dan menopang kelembagaan kelompok agar berfungsi optimal. | 1. **Memotivasi** kelompok untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perhutanan sosial.<br>2. **Memfasilitasi** penyusunan aturan dan rencana strategis kelompok (RKPS dan RKT).<br>3. **Mengorganisasi** struktur organisasi dengan jelas.<br>4. **Mengelola keterampilan** melalui pendampingan administrasi kelembagaan dan manajemen usaha tani. |
| | | | 2. Peran Edukasional<br><br>Peran edukasional berfungsi untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan wawasan baru kepada kelompok. | 1. **Menyadarkan** kelompok untuk mengelola lahan hutan secara lestari.<br>2. **Memberikan informasi** tentang diversifikasi usaha dan praktik pertanian di kawasan hutan.<br>3. **Menyediakan pelatihan** kewirausahaan untuk |

| No. | Variabel | Definisi Konsep | Dimensi | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | meningkatkan nilai jual produk.<br>4. Frekuensi kegiatan penyuluhan. |
| | | | 3. Peran Representatif<br><br>Peran representatif dilakukan untuk menghubungkan kelompok dengan sumber daya eksternal dan membela kepentingan kelompok. | 1. **Memfasilitasi akses** kelompok terhadap program bantuan dan permodalan yang berkualitas.<br>2. **Mengadvokasikan** kebutuhan kelompok dengan pihak luar untuk usaha produktif.<br>3. **Membangun jejaring** dengan pihak usaha untuk memasarkan produk kelompok. |
| | | | 4. Peran Teknis<br><br>Peran teknis berkaitan dengan kemampuan manajerial dan praktis agar dapat mendukung operasional kelompok secara profesional. | 1. **Melakukan riset** terhadap penyebab dan solusi masalah yang dihadapi kelompok.<br>2. **Pendampingan teknis** dalam pemetaan batas lahan garapan dan inventarisasi potensi wilayah kelola.<br>3. Mampu **menggunakan komputer** administrasi digital.<br>4. Frekuensi pemantauan kinerja kelompok. |

| No. | Variabel | Definisi Konsep | Dimensi | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2. | Faktor Keberhasilan Peran Penyuluh Kehutanan | Faktor keberhasilan peran mengacu pada Adam & Djazuli (2025) adalah kondisi yang berada dari dalam maupun luar diri penyuluh kehutanan untuk mendukung keberhasilan perannya. Faktor yang diteliti dalam penelitian ini terdiri atas motivasi, kompetensi dan sikap kerja, komunikasi, dukungan organisasi dan sarana prasarana, serta lingkungan sosial dan budaya masyarakat. | 1. Motivasi<br><br>Faktor ini berkontribusi terhadap pencapaian kinerja karena berasal dari kepuasan intrinsik atas pekerjaan yang dilakukan. | 1. **Kepuasan individu** saat melihat keberhasilan petani.<br>2. Rasa pengabdian dan **tanggung jawab** terhadap pekerjaan. |
| | | | 2. Kompetensi dan Sikap Kerja<br><br>Faktor ini berkaitan dengan kemampuan individu dari aspek teknis maupun non teknis yang dilaksanakan secara teratur, tepat waktu, dan konsisten. | 1. **Kompetensi teknis** bidang kehutanan.<br>2. **Kompetensi non teknis** saat melayani kunjungan kelompok.<br>3. **Konsistensi** dalam pelaksanaan tugas. |
| | | | 3. Komunikasi<br><br>Faktor ini berkaitan dengan proses dalam penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada individu maupun kelompok untuk pemahaman bersama. | 1. Kemampuan **menyampaikan pesan** secara jelas dan efektif.<br>2. **Kualitas hubungan** antara petani dan penyuluh kehutanan. |

| No. | Variabel | Definisi Konsep | Dimensi | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Dukungan Organisasi dan Sarana Prasarana<br><br>Faktor ini mencakup dukungan lembaga yang diberikan dalam bentuk sistem dan fasilitas untuk peningkatan kinerja. | 1. **Ketersediaan fasilitas fisik** pendukung kebutuhan kelompok.<br>2. **Ketersediaan alat bantu** dan media penyuluhan.<br>3. **Kebijakan organisasi yang adaptif** terhadap jam kerja. |
| | | | 2. Lingkungan Sosial dan Budaya<br><br>Faktor ini berkaitan dengan kekuatan modal masyarakat yang terdiri atas jaringan sosial dan budaya gotong royong untuk mendukung penerimaan kegiatan. | 1. **Jaringan sosial** masyarakat dalam kegiatan kelompok.<br>2. **Budaya gotong royong** yang dilakukan secara kolektif dari kelompok. |

*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)*

### 1.8.1 Peran Penyuluh Kehutanan

Penyuluh kehutanan adalah salah satu aktor kunci dalam pelaksanaan program perhutanan sosial yang berperan sebagai pendamping lapangan. Seorang pendamping memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada kelompok agar dapat memanfaatkan akses kelola hutan dengan baik (Hastanti, 2021). Penelitian ini akan menilai seberapa jauh penyuluh kehutanan sudah melaksanakan perannya dalam melakukan pendampingan tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha di KTH Mandiri Jaya melalui empat peran oleh Ife dan Tesoriero (2008).

1. Peran Fasilitatif: Penyuluh kehutanan sebagai seorang fasilitator diperlukan untuk memberikan stimulasi dan menjadi penopang dalam menjalankan program perhutanan sosial dengan baik. Adapun poin-poin yang akan diamati adalah:
    a. Menginspirasi anggota untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelompok perhutanan sosial.
    b. Memfasilitasi kelompok dalam penyusunan AD/ART atau aturan kelompok, rencana kegiatan KTH, aktivitas kelompok dalam kegiatan rehabilitasi, dan rencana usaha bidang kehutanan.
    c. Mengorganisasi kepengurusan kelompok melalui pembentukan struktur formal, pembagian tugas, peran, tanggung jawab, dan wewenang pengurus, serta pembentukan kader dan regenerasi kepemimpinan.

d. Mengelola keterampilan dan sumber daya kelompok melalui pendampingan administrasi kelembagaan dan manajemen usaha tani.

2. Peran Edukasional: Penyuluh kehutanan sebagai edukator berfungsi untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki kepada KTH sesuai dengan fungsi penyuluhan itu sendiri. Gejala yang akan diamati meliputi:
    a. Meningkatkan kesadaran kelompok untuk mengelola hutan secara lestari dan pemanfaatan sesuai potensi.
    b. Memberikan informasi dan pemahaman kepada anggota tentang praktik pertanian dan diversifikasi usaha produktif di kawasan hutan.
    c. Menyediakan pelatihan dalam peningkatan kapasitas SDM melalui kewirausahaan untuk meningkatkan nilai jual produk usaha perhutanan sosial.
    d. Frekuensi kegiatan penyuluhan yang dilakukan terhadap kelompok.
3. Peran Representatif: Penyuluh kehutanan sebagai representatif kelompok membawa kepentingan KTH Mandiri Jaya untuk memenuhi sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program perhutanan sosial. Peran ini memiliki beberapa poin yang bisa diamati yaitu:
    a. Mengupayakan akses kelompok kepada program bantuan, sumber dana permodalan, teknologi tepat guna pertanian, dan kebijakan baru untuk melaksanakan perhutanan sosial.

b. Mengadvokasikan kebutuhan kelompok untuk mencapai pengelolaan hutan yang lestari dan usaha yang produktif.
c. Membangun jejaring, kemitraan, dan temu usaha dengan pelaku usaha untuk memasarkan produk KTH.

4. Peran Teknis: Penyuluh kehutanan dalam memenuhi peran teknis perlu untuk memiliki kemampuan manajerial dan praktis agar dapat mendukung operasional kelompok secara profesional. Adapun poin-poin yang peneliti dapatkan dalam peran ini adalah:
    a. Menganalisis masalah, kebutuhan, peluang, dan tantangan yang dimiliki oleh kelompok terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya penunjang untuk strategi pemberdayaan.
    b. Memberikan pendampingan teknis dalam penataan batas lahan garapan kelompok agar sesuai dengan peta serta inventarisasi terhadap potensi dan daya dukung wilayah melalui pemetaan zona.
    c. Kemampuan dukungan teknis administrasi digital dan pemantauan kinerja KTH setiap tahun.

### 1.8.2 Faktor Keberhasilan Peran Penyuluh Kehutanan

Peran menurut David dan Newstrom (dalam Soemanagara, 2006) adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain. Tingkat keberhasilan peran seseorang dapat diukur melalui kinerja yang dilakukan. Hasibuan (dalam Pusparani, 2021) melihat kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan melalui kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Penelitian oleh Adam dan

Djazuli (2025) membagi faktor yang mempengaruhi kinerja menjadi dua konsep besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor tersebut adalah:

1. Faktor Internal. Faktor ini adalah kondisi yang melekat pada diri seorang penyuluh yang meliputi motivasi, kompetensi, pengalaman, sikap kerja, dan komunikasi.
2. Faktor Eksternal. Faktor ini adalah kondisi yang berasal dari luar diri seorang penyuluh meliputi dukungan organisasi dan sarana prasarana, gaya kepemimpinan, lingkungan dan budaya masyarakat, serta kebijakan pemerintah dan insentif.

Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan seluruh indikator untuk menyesuaikan dengan pengetahuan responden. Kerlinger (dalam Candra, 2021) mendefinisikan definisi operasional sebagai melekatkan arti dari suatu variabel melalui kegiatan atau tindakan untuk mengukur variabel tersebut dalam menyamakan persepsi antara peneliti dan orang-orang yang terkait dengan penelitian. Oleh karena itu, faktor yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi:

1. Motivasi. Motivasi internal adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja karena berasal dari kepuasan intrinsik atas pekerjaan yang dilakukan yang melihat pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
2. Kompetensi dan Sikap Kerja. Kompetensi dan sikap kerja adalah faktor yang berkaitan dengan kemampuan individu dari aspek teknis maupun non teknis dalam menjalankan tugasnya. Penyuluh dengan sikap kerja yang baik akan melaksanakan tugas secara teratur, tepat waktu, dan konsisten.

3. Komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses dalam penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada individu maupun kelompok untuk menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi yang terbuka dan berjalan dua arah akan mendukung kinerja dan meningkatkan kualitas hubungan antar individu.
4. Dukungan Organisasi dan Sarana Prasarana. Dukungan kelembagaan adalah bentuk dukungan yang diberikan berupa sistem yang memberikan kejelasan tugas, prosedur yang terstruktur, kebijakan yang adaptif, dan fasilitas kerja dalam bentuk infrastruktur penyuluhan berkontribusi dalam peningkatan kinerja.
5. Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat. Faktor ini berkaitan dengan kekuatan modal masyarakat yang terdiri atas aspek jaringan sosial (*social network*) (Suswadi *et al.*, 2024) dan budaya gotong royong masyarakat untuk mendukung penerimaan kegiatan.

**1.9 Argumentasi Penelitian**

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu isu yang banyak dilakukan dengan tujuan yang mulia untuk memberikan daya kepada kelompok tertentu untuk melaksanakan kehidupannya. Program perhutanan sosial menjadi kebijakan fundamental yang mendorong terjadinya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal dan hidup di kawasan hutan. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat untuk mengelola lahan hutan secara legal tetapi juga pengetahuan untuk mengelola lahan tersebut secara berkelanjutan. Hal tersebut menjadi tugas pokok seorang penyuluh kehutanan untuk memberikan perubahan di masyarakat dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Penelitian ini secara khusus dilakukan karena tidak banyak penelitian yang melakukan identifikasi terhadap peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan, khususnya kelompok tani hutan di Provinsi Jawa Tengah. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, seorang penyuluh kehutanan perlu memetakan strategi yang efektif dalam melaksanakan pendampingan guna mencapai tujuan dalam pemberdayaan masyarakat. KTH Mandiri Jaya menjadi subjek penelitian yang tepat mengingat terdapat keterbatasan dalam meningkatkan hasil usaha berbasis kehutanan dan menjadi salah satu KTH dengan kelas pemula. Melalui penelitian ini, perspektif peran pembangunan masyarakat akan menilai kinerja penyuluh kehutanan sebagai pelayan publik dan memberikan rekomendasi pendampingan yang efektif untuk meningkatkan kelas kelompok tani.

## 1.10 Metode Penelitian

### 1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan metode campuran (*mixed method*) dengan desain *sequential exploratory*. Pendekatan campuran menurut Creswell dan Clark adalah metode yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu kerangka kerja penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap suatu fenomena (Fathoni et al., 2025). Harvard Catalyst (dalam Yam, 2022) berpendapat bahwa pendekatan ini membantu peneliti mendapatkan deskripsi dan interpretasi data yang lebih kuat dengan temuan kualitatif dari sampel yang kecil dapat dipahami secara lebih luas melalui pengujian kuantitatif. Desain *sequential exploratory* memungkinkan peneliti membangun teori berdasarkan data eksploratif (kualitatif) sebelum

melakukan validasi menggunakan data numerik (kuantitatif) sehingga temuan lebih komprehensif dan berbasis bukti (Vebrianto dalam Fathoni et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian yang dilakukan untuk menemukan peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan kelompok tani hutan di Kabupaten Semarang lebih cocok menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*) karena peneliti dapat memiliki pemahaman mendalam terhadap masalah penelitian untuk mengembangkan instrumen penelitian yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Creswell (dalam Fathoni et al., 2025), desain penelitian *sequential exploratory* memiliki tujuan untuk mengembangkan teori atau hipotesis berdasarkan data kualitatif sebelum diuji dengan data kuantitatif. Penarikan kesimpulan yang mengintegrasikan temuan kualitatif dan verifikasi kuantitatif akan memperkaya temuan penelitian yang mampu memahami dinamika pendampingan yang komprehensif dengan pembuktian pemerataan kegiatan pemberdayaan berbasis pengalaman nyata dari anggota KTH Mandiri Jaya.

### 1.10.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KTH Mandiri Jaya yang berlokasi di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) Tahun 2021-2030 yang menyatakan bahwa lahan hutan yang ditetapkan sebagai lahan perhutanan sosial berada di Desa Nyemoh seluas $\pm 118$ ha. Selain itu, pengambilan data kualitatif terhadap peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan KTH dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah dan Cabang

Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga Maret 2026.

### 1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Tatang M. Arifin (dalam Wijaya et al., 2025) adalah seseorang atau sesuatu yang berkenaan dengan penelitian untuk memperoleh keterangan. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* dalam menentukan subjek penelitian yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian. Berikut adalah daftar informan dalam fase eksplorasi data kualitatif.

1. Penyuluh Kehutanan di DLHK Provinsi Jawa Tengah guna mengetahui data kebijakan makro terkait tugas pokok dan fungsi penyuluh kehutanan serta target pemberdayaan kelompok tani hutan di tingkat provinsi.
2. Penyuluh Kehutanan Kecamatan Bringin sebagai aktor yang melaksanakan pendampingan kelompok perhutanan sosial di KTH Mandiri Jaya.
3. Kepala Desa Nyemoh sebagai penanggung jawab pengelolaan lahan hutan di Desa Nyemoh oleh masyarakat.
4. Pengurus KTH Mandiri Jaya untuk mengetahui kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan kepada kelompok tani hutan di Desa Nyemoh.
5. Perwakilan anggota KUPS Mandiri Jaya I, KUPS Mandiri Jaya II, dan KUPS Mandiri Jaya III guna mengetahui persepsi dari capaian kegiatan pendampingan yang diterima terhadap tingkat keberdayaan kelompok dalam lima tahun terakhir.

Setelah data kualitatif diterima, penelitian kuantitatif dilakukan dengan menyusun kuesioner sesuai dengan target pemberdayaan yang dilakukan oleh

Penyuluh Kehutanan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu peningkatan tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha yang tercermin dalam Permen LHK Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada 60 orang anggota KTH Mandiri Jaya melalui jenis *proportionate stratified random sampling* dalam pertemuan kelompok. Penelitian ini akan melihat pelaksanaan kegiatan pendampingan penyuluh kehutanan secara mendalam pada KTH tertentu sehingga menghasilkan rekomendasi perbaikan yang aplikatif.

### 1.10.4 Populasi dan Sampel

#### 1.10.4.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2015) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh anggota KTH Mandiri Jaya dengan jumlah sebanyak 145 orang. Mengingat adanya variasi dalam operasional unit usaha yang dapat mempengaruhi peran pendampingan maka populasi akan diklasifikasikan berdasarkan strata kelompok usaha, yaitu KUPS Mandiri Jaya I, KUPS Mandiri Jaya II, dan KUPS Mandiri Jaya III. Oleh karena itu, pengambilan sampel akan menggunakan teknik yang dapat mewakili seluruh kelompok guna mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan.

#### 1.10.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Badri (2012) menyebutkan bahwa penentuan sampel harus bisa mewakili dari sebuah populasi agar kesimpulan yang dibuat dapat diberlakukan untuk

populasi. Peneliti menggunakan Rumus Slovin untuk menentukan besaran sampel sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Santoso (2023) dengan persamaan sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = adalah besarnya sampel yang dibutuhkan

N = besarnya populasi yang menjadi sumber sampel

$e^2$ = batas kesalahan yang ditentukan berkisar antara 1%, 5% dan 10%.

Peneliti menggunakan taraf kesalahan sebesar 10% dalam penentuan sampel dengan tingkat kepercayaan penelitian adalah 90%. Menurut Gay, Mills, dan Airasian (dalam Iba dan Wardhana, 2023), penelitian yang menggunakan metode deskriptif harus memiliki minimal 10% dari populasi. Populasi penelitian yang berada di KTH Mandiri Jaya berjumlah 145 orang sehingga dengan menggunakan rumus tersebut, sampel sudah melampaui standar minimal yang ditetapkan oleh Gay. Berikut adalah jumlah sampel yang akan menjadi responden penelitian.

$$n = \frac{145}{1+145(0,1)^2} = \frac{145}{1+145(0,01)} = \frac{145}{1+1,45} = 59,18 \text{ (dibulatkan 60)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah responden yang akan digunakan dari total populasi anggota KTH adalah 60 orang.

### 1.10.5 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi anggota KTH Mandiri Jaya terbagi atas tiga kelompok usaha perhutanan sosial, yaitu KUPS Mandiri Jaya I, KUPS Mandiri Jaya II, dan KUPS

Mandiri Jaya III. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel secara kuantitatif dilakukan melalui jenis *proportionate stratified random sampling*, yaitu melibatkan pemilihan partisipan berdasarkan keanggotaan mereka dalam strata tertentu secara proporsional (Candra *et al.*, 2021). Teknik ini dipilih agar dapat merepresentasikan capaian pendampingan yang merata terhadap keberdayaan KTH dalam menjalankan usaha pada tabel 1.8 berikut.

**Tabel 1.8 Proporsi Responden Penelitian**

| No. | KUPS | Populasi | $\frac{\text{Populasi KUPS}}{\text{Populasi KTH}} \times \text{Sampel}$ | Jumlah Responden |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KUPS Mandiri Jaya I | 48 | $\frac{48}{145} \times 59 = 19{,}5$ | 20 |
| 2. | KUPS Mandiri Jaya II | 58 | $\frac{58}{145} \times 59 = 23{,}6$ | 24 |
| 3. | KUPS Mandiri Jaya III | 39 | $\frac{39}{145} \times 59 = 15{,}86$ | 16 |
| **Total** | | | | **60** |

*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)*

### 1.10.6 Jenis Data

Penelitian campuran menggunakan integrasi di antara dua jenis data secara sistematis guna menjawab tujuan penelitian. Wiratna Sujarweni (dalam Hamidah, Santoso and Suwitri, 2023) melakukan klasifikasi terhadap data penelitian menjadi dua jenis, yaitu data yang berbentuk kualitatif dan data kuantitatif. Fase pertama dilakukan dengan mengambil data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan pemberdayaan kelompok tani hutan oleh penyuluh kehutanan di KTH Mandiri Jaya. Fase selanjutnya, data kuantitatif digunakan untuk

menemukan persepsi kelompok berdasarkan temuan kualitatif melalui kuesioner yang terstruktur kepada 60 responden penelitian. Kutipan wawancara dan persentase jawaban responden akan disajikan secara berdampingan untuk menunjukkan pola integrasi data dalam menilai keterlibatan penyuluh kehutanan pada kegiatan pendampingan pemberdayaan KTH.

### 1.10.7 Sumber Data

Arikunto (dalam Soesana et al., 2023) mendefinisikan sumber data adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh. Berdasarkan bentuknya, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer. Data ini menjadi sumber data utama yang dikumpulkan peneliti secara langsung di lapangan. Sumber data primer diperoleh melalui responden dan melibatkan beberapa orang sebagai sampel penelitian. Husein Umar (2016) mengkategorikan data primer adalah hasil dari wawancara, observasi, dan kuesioner sehingga penelitian ini akan mengintegrasikan ketiga sumber data.
2. Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga yang berpengaruh dalam penelitian, buku pustaka, dan sumber lainnya dengan mengumpulkan data yang sudah ada sebelumnya. Data ini bisa didapat melalui artikel jurnal, situs publikasi pemerintah, catatan internal, dan sumber lain yang mendukung data primer.

### 1.10.8 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam proses penelitian yang menjadi jembatan antara teori dengan realitas lapangan. Pendekatan penelitian

dengan metode campuran menggabungkan instrumen kualitatif dan kuantitatif secara berurutan untuk mendapatkan jawaban atas fenomena penelitian yang diteliti. Instrumen tersebut menurut Badri (2012) dan Sugiyono (2015) dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, dan tes. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan secara spesifik didapatkan melalui empat cara, yaitu wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara. Teknik ini digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terkait fenomena penelitian sebagai triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam kepada informan yang memungkinkan peneliti menyesuaikan alur pertanyaan sesuai jawaban yang diberikan.
2. Kuesioner. Teknik ini dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengambilan data melalui kuesioner dilakukan dengan teknik kuesioner berbantuan (*assisted questionnaire*) untuk mengonfirmasi temuan kualitatif secara meluas pada pertemuan kelompok.
3. Observasi. Teknik ini dilakukan untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena yang diteliti untuk mencatat gejala, proses kerja, dan perilaku yang dilakukan sebagai bukti fisik temuan penelitian.
4. Dokumentasi. Teknik ini digunakan dengan memeriksa dokumen pendukung yang telah ada untuk memastikan kredibilitas data dari informan penelitian.

### 1.10.9 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Sugiyono (2015) membagi skala pengukuran ke dalam empat jenis, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran dengan tujuan untuk menilai persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu, yaitu analisis peran dan faktor sehingga cocok menggunakan skala Likert yang termasuk dalam bentuk skala ordinal (Iba dan Wardhana, 2023). Berikut adalah penentuan skor untuk keperluan analisis kuantitatif.

**Tabel 1.9 Skala Pengukuran Penelitian**

| No. | Skala | Kodifikasi | Skor |
|---|---|---|---|
| 1. | Sangat Tidak Setuju | STS | 1 |
| 2. | Tidak Setuju | TS | 2 |
| 3. | Setuju | S | 3 |
| 4. | Sangat Setuju | SS | 4 |

*Sumber: Sugiyono (2015)*

Selain menentukan skala pengukuran, penelitian ini akan melakukan analisis deskriptif untuk menilai objek yang diteliti menggunakan *mean* atau rata-rata. Sudjana (dalam Maaruf *et al.*, 2023) menyatakan bahwa *mean* dapat mencirikan sekelompok bilangan yang diteliti. Adapun penilaian terhadap nilai *mean* tersebut dipetakan dalam rentang interval yang bermanfaat untuk melakukan penilaian secara objektif berdasarkan batasan tertentu terhadap dimensi yang diteliti. Rumus yang digunakan dalam mencari interval adalah:

$$Interval = \frac{nilai\ tertinggi\ -\ nilai\ terendah}{banyaknya\ kelas}$$

Berdasarkan rumus tersebut, perhitungan terhadap interval didapatkan hasil sebagai berikut:

$$I = \frac{4-1}{4} = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

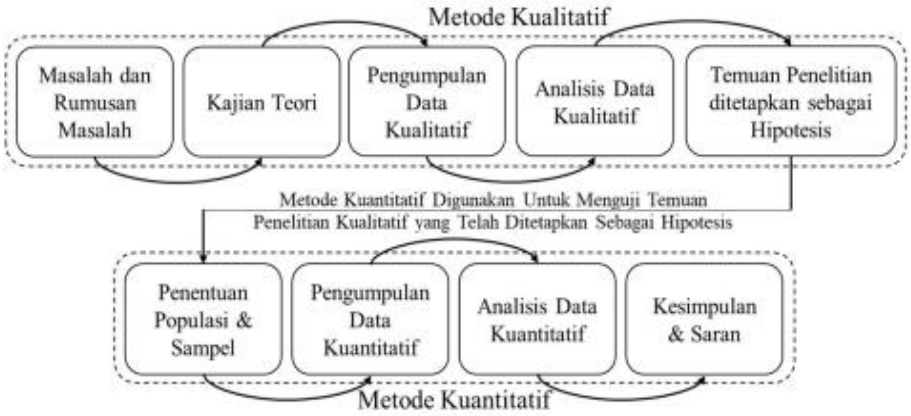
Hasil perhitungan terhadap interval penilaian didapatkan skor sebesar dengan jumlah kelas terhadap skor adalah I = 0,75. Oleh karena itu, peneliti menetapkan ketetapan terendah pada skor 1.00 sehingga *range* yang didapatkan:

**Tabel 1.10 Rentang Skala**

| Skala Penilaian | Kategori |
|---|---|
| 1.00 – 1.75 | Sangat Rendah |
| 1.76 – 2.50 | Rendah |
| 2.51 – 3.25 | Tinggi |
| 3.26 – 4.00 | Sangat Tinggi |

### 1.10.10 Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono (2015) mendefinisikan analisis data sebagai kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden dan sumber data lain terkumpul. Penelitian campuran memiliki tantangan dalam mengintegrasikan data kualitatif dan data kuantitatif secara berurutan. Penelitian dengan desain *sequential exploratory* dimulai dengan penggunaan metode kualitatif pada tahap pertama yang diikuti oleh metode kuantitatif untuk menguji hasil pada metode kualitatif (Khabibullah *et al.*, 2024) sebagaimana tersaji pada gambar berikut.




**Gambar 1.4 Langkah-Langkah Desain Sequential Exploratory**

*Sumber: Khabibullah et al. (2024)*

Berdasarkan gambar 1.4 terlihat bahwa analisis data pada desain *sequential exploratory* dimulai dengan analisis data kualitatif sebelum melaksanakan analisis data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif oleh Miles dan Huberman (dalam Saleh, 2023) yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data (*data collection*) diperoleh dari catatan deskriptif yang dialami oleh peneliti serta catatan reflektif yang berisi penafsiran peneliti terhadap data yang didapat dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Kondensasi data (*data condensation*) dilakukan dengan memilih data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian serta disusun secara sederhana dan sistematis untuk menjabarkan temuan dan makna yang diperoleh.
3. Penyajian data (*data display*) adalah penggabungan informasi dalam menggambarkan fenomena yang terjadi, baik dalam bentuk narasi, matriks, maupun grafik untuk memudahkan pembacaan informasi dan data.

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dilakukan setelah seluruh proses dilakukan untuk mencari pola, tema, hubungan, persamaan, atau hipotesis dari kondensasi data untuk diambil kesimpulan akhir terhadap fenomena penelitian.

Setelah temuan penelitian kualitatif ditarik sebuah kesimpulan untuk menyusun instrumen penelitian, pengujian terhadap instrumen perlu dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas agar menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Uji validitas terhadap instrumen menggunakan korelasi *product moment* (Sugiyono, 2015) sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach ($\alpha$) dengan koefisiensi alpha lebih besar dari 0,70 untuk dianggap reliabel (Iba dan Wardhana, 2023). Selanjutnya, analisis data kuantitatif pada penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif. Iba dan Wardhana (2023) membagi teknik ini ke dalam bentuk visualisasi data, ukuran pusat, dan sebaran data.

1. Visualisasi data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk persentase untuk menggambarkan kecenderungan konfirmasi temuan kualitatif secara deskriptif.
2. Pemusatan data digunakan untuk menentukan nilai pusat atau nilai tengah dalam bentuk nilai *mean* (rata-rata) untuk menggambarkan pusat data terhadap persepsi.
3. Sebaran data digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebar dari pusatnya, semakin kecil penyebaran data maka data semakin homogen.

### 1.10.11 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini menggunakan tiga dimensi validitas, yaitu validitas kuantitatif, kualitatif, dan integratif (Fathoni et al., 2025). Validitas kuantitatif terhadap instrumen penelitian dilakukan melalui uji instrumen sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Adapun validitas kualitatif dapat dicapai melalui triangulasi, *member checking*, observasi mendalam, dan deskripsi naratif. Salah satu tantangan yang dialami oleh desain penelitian *sequential exploratory* adalah kebutuhan sumber daya yang besar, terutama waktu sehingga validitas secara kualitatif dilakukan dengan triangulasi. Hardani (2020) membagi kegiatan triangulasi dilakukan dengan dua cara yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Triangulasi teknik, yaitu penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda oleh sumber data yang sama dalam suatu penelitian. Penelitian ini menerapkan tiga instrumen pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi.
2. Triangulasi sumber, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda. Cara ini dilakukan untuk validasi data kualitatif melalui data dari berbagai informan dalam mengungkap fenomena dan bermanfaat untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.